

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN DI
KELURAHAN KUJANGSARI KECAMATAN BANDUNG KIDUL
KOTA BANDUNG**

***POLICY IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION PROGRAM FOR
REGIONAL EMPOWERMENT DEVELOPMENT IN KUJANGSARI
KELURAHAN, BANDUNG KIDUL DISTRICT, BANDUNG CITY***

Nia Pusparini¹, Firman Alamsyah Taufik Robbi², Veny Purba³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Langlangbuana Bandung

¹niapusparini9763@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) yang belum berhasil di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu menurut Edwards III dari faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayan Kewilayahan yang berdasarkan pada Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi belum optimalnya pernyataan informasi pihak aparat Kelurahan dengan Masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui Studi Literatur (jurnal dan buku), Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dengan para informan dan Dokumentasi. Hasil Penelitian di Kelurahan Kujangsari Kota Bandung menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) belum berhasil. Hal tersebut dilihat berdasarkan masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam kegiatan PIPPK dan tidak melibatkan Masyarakat dalam kegiatannya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PIPPK

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of the regional development and empowerment innovation program (PIPPK) which has not been successful in Kujangsari Village, Bandung Kidul District, Bandung City. The theory used in this research is according to Edwards III of the crucial factors that influence policy, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition as the Implementation of Regional Development and Empowerment Innovation Program Policies based on Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures that are not yet optimal in providing information from the Kelurahan officials to the community.

The research method used is a qualitative method. Data were obtained through Literature Studies (journals and books), participant observation, in-depth interviews with informants

and documentation. The results of research in Kujangsari Village, Bandung City show that the implementation of the Regional Development and Empowerment Innovation Program Policy (PIPPK) has not been successful. This can be seen based on the lack of community participation in PIPPK activities and not involving the community in its activities.

Keywords: Policy Implementation, PIPPK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 tentang, Pemerintah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 mengenai Program PIPPK berawal dari pemikiran perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila, ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai tingkat bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui konsep pemberdayaan masyarakat.

Kota Bandung membuat suatu Program baru yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparat kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Ciri khas PIPPK yaitu meningkatkan peranan masyarakat dalam membangun daerahnya masing masing. Kunci utama PIPPK yaitu kepemimpinan dan empat prinsip yang dijalani ialah transparan, akuntabel, efektif dan efisien, ekonomis berkelanjutan, demokratis dan

partisipatif. Esensinya, berpartisipasi pembangunan masyarakat di wilayahnya. Secara umum peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan PIPPK adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Adapun sasarannya yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan pembangunan.

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 tentang perubahan 107 tahun 2018 disebutkan bahwa lembaga penunjang pelaksanaan PIPPK dan Ruang Lingkupnya adalah:

“Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), ruang lingkup kegiatannya, yaitu infrastruktur, sosial masyarakat, penguatan lembaga RW, pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, serta pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP PKK) Kelurahan: Penguatan kelembagaan, pelaksanaan pogram lingkup pokja I PKK, pelaksanaan pogram lingkup pokja II PKK, pelaksanaan pogram lingkup pokja III PKK, dan Pelaksanaan program lingkup pokja IV PKK; Karang Taruna (Tarka) unit kelurahan: Penguatan Kelembagaan, kelengkapan sarana dan kelengkapan olah raga dan Kesenian, Pengabdian pada masyarakat, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan, Pelatihan dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelurahan: Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan, dan koordinasi proses Pembangunan”.

Bidang perkerjaan PIPPK dimaksudkan untuk terwujudnya komitmen perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan cara pendekatan Inovasi, Desentralisasi, Kolaborasi. Inovasi adalah suatu gagasan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, Desentralisasi adalah mengelola kewenangan kegiatan pembangunan wilayah, dan Kolaborasi adalah sebagai kepentingan proses pembangunan.

Kelurahan Kujangsari adalah salah satu kelurahan yang melaksanakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Dalam rangka program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Kujangsari dilaksanakan oleh 4 (empat) Lembaga Kemasyarakatan yaitu Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan, Karang Taruna Unit Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dari ke empat lembaga yang melaksanakan PIPPK di Kelurahan Kujangsari, hanya dibatasi pada salah satu lembaga Kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM. LPM adalah Lembaga atau wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, melakukan penelitian secara mendalam untuk mengkajinya dari faktor-faktor krusial implementasi kebijakan pada pendekatan teori Edwards III dalam Winarno (2016: 157) yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung)**.

1.2 Identifikasi Masalah.

Untuk memperjelas masalah penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan PIPPK mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

2. TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Pengertian Kebijakan.

Istilah kebijakan berasal dari kata policy dalam bahasa Inggris, sedangkan kata policy sering digunakan dalam praktek kenegaraan atau pemerintahan

Istilah kebijakan, berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris, sedangkan kata *policy* sering digunakan dalam praktik kenegaraan atau pemerintahan, sedangkan istilah kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom* yang berarti lebih cenderung kepada kearifan seseorang.

Dari pendapat para ahli di atas, maka kebijakan merupakan suatu perbuatan pengambilan keputusan yang dilakukan perorangan atau kelompok atau pemerintah dalam usaha memilih dan mencapai suatu organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik.

Anderson (dalam Wahab 2012:3) menegaskan mengenai pengertian kebijakan sebagai “langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Berdasarkan pendefinisian dari masing-masing kata kebijakan dari publik tersebut, maka pengintegrasian kedua kata tersebut akan memunculkan definisi yang lebih komperhensif terhadap kebijakan publik sebagaimana dinyatakan oleh Dye dalam Islamy (2012:18) bahwa “*public policy is whatever government choose to do or not to do*”.

Kebijakan publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah istilah Jean Rousseau, filsuf sosial Perancis yang sejaman dengan *Montesquieu* sebagai *the social contract or principles of political rights*, sebagaimana Rousseau dalam Nugroho (2013:59) menyatakan bahwa

“Kebijakan publik adalah kontrak sosial itu sendiri”.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis guna kepentingan penelitian ini peneliti mencoba mengaplikasikan model lainnya berdasarkan model menurut Edward III dalam Winarno (2012:177) bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik kebijakan:

“Adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya atau *The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects.*”

Dapat dipahami dari keempat faktor-faktor kritis atau variabel-variabel implementasi kebijakan publik yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi. Yang mana dari keempat faktor-faktor tersebut beroperasi secara simultan (bersamaan) dan berinteraksi untuk membentuk ikatan (*linkage*) antara implementasi kebijakan dan pencapaian tersebut tidak hanya menentukan hubungan atau pendekatan yang ideal antara variabel bebas dan variabel terikat mengenai

kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antar variabel dalam mencapai keberhasilan implementasi publik.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan atau dipengaruhi pula oleh kebijakan itu sendiri. Menurut Tachjan (2006 : 21) menjelaskan proses efektifitas kebijakan publik akan ditentukan atau dipengaruhi yaitu proses perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor kritis atau variabel krusial yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Winarno (2008:208) dapat diketahui melalui *“Four critical factors or variables in implementing public policy: Communication; Resources; Dispositions or attitude and Bureaucratic Structure”* yang secara simultan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah.

2.4 Kerangka Pemikiran dan Proposisi

2.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan mengkaji permasalahan yang ada dalam program PIPPK untuk penguatan lembaga kemasyarakatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) khususnya, di Kelurahan Kujangsari Kota Bandung. Pedoman yang digunakan dalam program PIPPK ditetapkan oleh Wali Kota Bandung peraturan Wali Kota Bandung No. 281 tahun 2015 tentang pelaksanaan Program

Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dan peraturan pemerintah daerah no 3 tahun 2014 tentang RPJMD (Rangka Jangka Panjang Menengah Daerah) dan Kemendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Berikut peneliti menjabarkan keempat dimensi di atas, berdasarkan hasil penelitian yang lebih jelas dan menganalisis proses implemementasi kebijakan menurut Edward III dalam Winarno (2016:157):

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi/sikap
4. Struktur birokrasi bahwa adanya mekanisme program biasanya sudah ditetapkan melalui pengambilan keputusan dengan adanya *standard operating procedur* (SOP).

Menurut peraturan Wali Kota Bandung 281, bermaksud bahwa mewujudkan kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan PIPPK dicakup pemberdayaan masyarakat.

2.4.2 Proposisi.

Dengan model kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berdasarkan pada Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi belum optimalnya pernyataan

informasi pihak aparat Kelurahan dengan Masyarakat.

3. Metode Penelitian.

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kujangsari. Adapun landasan yuridis mengenai penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai aturan peraturan Kementrian Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tujuan meswadayakan masyarakat dalam menjalankan pembangunan yang partisipasif dan bahwa penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu penguatan bidang administrasi, penguatan penanggulangan bencana kebakaran, penguatan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar dalam kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Alasan peneliti memilih objek penelitian di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Program PIPPK mengenai penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

3.2 Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2019: 4) sebagai berikut:

”Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.”

3.3 Sumber Data.

Sumber sumber data dalam penelitian ini menurut sugiyono (2019: 15) adalah subyek darimana data diperoleh adalah sebagai berikut::

1. Sumber Data Primer (*Primary Data*).
2. Sumber Data Sekunder (*Secondary Data*).

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

Di dalam teknik observasi menurut Sugiyono (2019: 64) dibagi 3 yaitu :Observasi Partisipasi,Observasi Tidak Teratur, dan Observasi Kelompok.

“Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara dan dokumentasi. Adapun objek penelitian atau key informan secara terbuka melalui wawancara di antaranya: Aparat Kelurahan, aparat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tokoh Masyarakat.”

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kondisi Umum Kelurahan

Kujangsari Kota Bandung.

Secara geografis Kota Bandung merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian berbukit - bukit, sehingga merupakan panorama yang indah. Kota Bandung, merupakan salah satu wilayah yang termasuk Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul merupakan, salah satu bagian wilayah kota Bandung, terdiri atas 9 RW dan 76 RT, secara administratif kelurahan Kujangsari dibatasi oleh sebelah Utara: berbatasan dengan Kebon Jeruk; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Panjunan; Sebelah Barat: berbatasan dengan Bojongloa Kaler; dan Sebelah Timur : berbatasan dengan Karang Anyar.

4.1.1 Kondisi Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung merupakan, salah satu bagian wilayah Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar, 74.368 ha. Secara administratif Kelurahan Kujangsari dibatasi oleh Selatan Kelurahan: Panjunan Kecamatan Astananyar Kota Bandung; bagian Utara:: Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir; bagian Timur:: Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astananyar; dan bagian Barat: Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler.

4.1.2 Potensi Wilayah Kujangsari

Menggambarkan potensi wilayah yang menjadi unggulan Kelurahan antara lain: Wilayah RW.04 yang menjadi wilayah percontohan untuk Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan); Kampung Barongsay; Pusat Percetakan Pagarsih; Tahu Yunyi dan Tahu Talaga.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk Kelurahan Kujangsari merupakan suatu gagasan adanya kebijakan karena masyarakat di kelurahan kebanyakan kurang memahami adanya pelaksanaan PIPPK. Dalam kajian ini memaparkan seta menganalisis data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian melalui studi literatur, Observasi Partisipan, Wawancara mendalam dan Dokumentasi kepada informan yang terlibat dalam kegiatan PIPPK di Kelurahan Kujangsari Kota Bandung antara lain di bawah ini :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PIPPK mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

5. Simpulan Dan Saran

5.1. Simpulan

Pelaksanaan kebijakan dalam PIPPK di Kelurahan Kujangsari masih belum optimal. Dari hasil kajian variabel implementasi Kebijakan oleh Edward

III (terdapat empat variabel penting dalam penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat membantu mendorong masyarakat termotivasi untuk mengembangkan wilayahnya dalam pelaksanaan PIPPK.

Berdasarkan pada konteks pelaksanaan Program PIPPK untuk menguatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 22 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan mempunyai sasaran yaitu memajukan, memberdayakan masyarakat, mengembangkan aspirasi swadaya masyarakat.

5.2. Saran

Secara Konseptual seharusnya yang dibutuhkan masyarakat dengan memotivasi masyarakat dengan cara memberi bimbingan, mengajak masyarakat untuk membuat peluang usaha seperti pelatihan kewirausahaan (UMKM), Pelatihan usaha salon, pelatihan usaha mengelola sampah organik menjadi benda yang berguna seperti Tas, Dompot , dan lainya bagi masyarakat di Kelurahan Kujangsari Kota Bandung. Terutama penting untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam suatu Kebijakan bagi Ilmu Pemerintah.

Bagi Pemerintah Kelurahan sebaiknya lebih banyak melakukan hal yang menjadi kekurangan dari konsep pemberdayaan masyarakat, dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Disarankan, sebaiknya bagi Pemerintah Kelurahan Kujangsari agar

memberikan dorongan dan motivasi tentang pengetahuan, kegiatan yang menjurus ke arah pendidikan,dan bidang Ekonomi. Selain itu, memberdayakan melalui kegiatan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan pembuatan saluran air bersih (MCK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell W.John. 2019. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed*. Edisi IV. Alih bahasa oleh Acmad Fawaid.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Hoogerwerf, A. 2015. *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep dan Sistem*. Bandung: Alumni.
- Islamy, M Irvan, 2012. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung: Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan-Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja Haw. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Sumber Sumber Lain**
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan..

_____.2007. Peraturan
Kemeundagri No 5 tahun 2007
Tentang *Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan.*
Propinsi Jawa Barat. 2015. Peraturan
Walikota No 281 Tahun 2015
Tentang *Pelaksanaan Program
Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan
(PIPPK).*

_____. 2015. Peraturan
Walikota Nomor 436 Tahun
2015 Tentang *Pentujuk
Pelaksanaan Program Inovasi
Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan (*
PIPPK).
_____.2014. Peraturan Daerah
No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (RPJMD).